

Research Article

PANCASILA TEGAKKAN HUKUM: KEPATUHAN TANPA BERKEPIHAKAN PADA YANG BERKUASA**Aryn Mutifa Arfandi, Siti Maizul Habibah**

Universitas Mataram; arynmutifaa@student.ittelkom-sby.ac.id

Corresponding Author, Email: arynmutifaa@student.ittelkom-sby.ac.id (Aryn Mutifa Arfandi)

Abstract

Pentingnya penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan ideologi negara Indonesia. Hal ini menekankan perlunya ketaatan tanpa pandang bulu terhadap hukum terlepas dari siapa yang berkuasa. Menyoroti tiga nilai utama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia. Hal ini mengakui bahwa meskipun nilai-nilai ini penting, keadilan sering kali berpihak pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin. Untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik, disarankan penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Upaya untuk memperkuat dan menerapkan Pancasila dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai rujukan hukum internasional dan memperbaiki kurikulum pendidikan tinggi hukum untuk mengatasi masalah ideologi terkait Pancasila dalam penegakan hukum.

Keywords: hukum, keadilan, kepatuhan**PENDAHULUAN**

Dasar negara Indonesia atau yang biasa di kenal Pancasila memiliki lima sila yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Febria Nurita & Sugiarto, n.d.). Latar belakang pentingnya tegakkan hukum dan kepatuhan pada hukum tanpa berkepihakan pada yang berkuasa adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini penting karena keadilan sosial merupakan salah satu sila Pancasila yang harus dilaksanankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial mencakup persamaan hak sosial, ekonomi dan politik bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Menegakkan dan menaati

hukum tanpa memihak pada yang berkuasa juga penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Jika hukum tidak diterapkan secara adil dan tanpa pandang bulu, maka akan timbul ketidakadilan dan ketidakstabilan yang dapat mengancam keamanan negara.

Implementasi Pancasila sebagai penegak hukum di Indonesia penting untuk menghapus diskriminasi sosial dan melindungi hak asasi manusia. Diskriminasi vertikal dan horizontal melanggar prinsip-prinsip Pancasila. Untuk memastikan penegakan hukum dan hak asasi manusia di negara ini, harus ada fokus pada pemahaman dan penerapan empat sila lainnya dari Pancasila (Dr. Oksidelfa Yanto., 2020). Hal ini akan memungkinkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemerosotan hukum di Indonesia, seperti kualitas dan independensi lembaga penegak hukum, partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, dan ancaman terhadap fondasi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Dengan memperkuat perwujudan keadilan Pancasila dalam penegakan hukum, Indonesia dapat mewujudkan negara hukum yang melindungi segenap warga negaranya. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum, diharapkan dapat terwujud kepatuhan pada hukum tanpa adanya diskriminasi sosial terhadap yang lemah, sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial, menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta menghormati prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum normatif-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum (Muhaimin, 2020). Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum, serta mengkaji hukum klinis yang berkaitan dengan pokok penelitian. Kemudian digunakan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa teknik penelitian kepustakaan, yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian (Zainudin, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya tegakkan hukum dan kepatuhan pada hukum tanpa berkepihakan pada yang berkuasa dalam mewujudkan keadilan sosial, menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta menghormati prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat

Tegakkan hukum dan kepatuhan pada hukum tanpa berkepihakan pada yang berkuasa adalah sangat penting, karena dapat membawa banyak manfaat. Beberapa contohnya ialah:

1. Penegakan hukum yang adil dan merata sangat penting dalam menghormati prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Dengan adanya kualitas demokrasi yang baik, Masyarakat akan lebih merasa dihargai dan diakui hak-haknya.
2. Penegakan hukum yang baik dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar hukum.
3. Meningkatkan keadilan sosial. Penegakan hukum yang adil dan merata dapat meningkatkan keadilan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar hukum, tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Dengan adanya keadilan sosial, Masyarakat akan lebih terpercaya bahwa hukum benar-benar berlaku untuk semua orang

Diperlukan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan juga pemberdayaan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang konsisten dan merata, tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Perlu juga adanya upaya untuk menghilangkan budaya korupsi para penegak hukum, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta implementasinya dalam bangunan negara hukum

Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua kategori: material dan formal. Sumber hukum material mencakup berbagai faktor seperti hubungan sosial, hubungan politik, ekonomi, tradisi, perkembangan internasional, dan kondisi geografis, yang berkontribusi pada pembentukan hukum. Contoh dari sumber material adalah Pancasila, yang berfungsi sebagai identitas hukum nasional di Indonesia, yang mengandung konten filosofis yang menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk pengembangan hukum. Namun, Pancasila tidak memberikan perintah, larangan, atau sanksi yang spesifik. Di sisi lain, sumber hukum formal mengacu pada sumber-sumber di mana peraturan yang mengikat secara hukum dan penerapannya diformalkan. Penting untuk dicatat bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai sumber hukum materiil, menurut penjelasan Sudiko Merkosumo.

Teori hukum Hans Kelsen tentang *grundnorm* (aturan dasar) dan *stufenbauthorie* (aturan-aturan) telah sangat mempengaruhi korpus hukum modern. Menurut Kelsen, standar dasar adalah standar yang nilainya tidak dapat diturunkan dari standar yang lebih tinggi. Sebuah sistem norma atau tatanan norma terdiri dari semua norma yang nilainya dapat dikaitkan dengan norma dasar yang sama. Standar dasar ini bertindak sebagai penghubung yang mengikat semua standar. Aspek unik dalam membentuk tatanan normatif adalah bahwa sebuah norma dalam

sistem tertentu hanya dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa norma tersebut mendapatkan nilainya dari norma dasar yang membentuknya. Singkatnya, teori Kelsen menekankan pentingnya *grundnorm* dan struktur hirarkis norma hukum dalam membangun tatanan normatif.

Nawiasky dan Kelsen sama-sama berfokus pada konsep standar tertinggi atau norma dasar suatu negara. Nawiasky berpendapat bahwa standar dasar suatu negara tidak dibentuk oleh standar nasional, melainkan oleh standar yang lebih tinggi yang diandaikan atau ditetapkan oleh rakyat negara tersebut. Norma dasar ini berfungsi sebagai dasar bagi standar hukum yang mendasari dan mempengaruhi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Di sisi lain, Kelsen menjelaskan hubungan antar norma melalui teorinya tentang norma hirarkis atau *stufenbau*. Ia menggambarkan hubungan ini sebagai hubungan "superioritas" dan "subordinasi", di mana norma yang lebih tinggi menentukan pembentukan norma yang lebih rendah. Menurut Achmad Ali, teori Kelsen mengikuti perkembangan logis dari standar tertinggi yang abstrak ke standar yang lebih rendah yang lebih spesifik dan beragam. Dalam proses ini, yang semula "harus" berubah menjadi "apa yang bisa" dilakukan. Secara keseluruhan, baik Nawiasky maupun Kelsen memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang peran dan hierarki norma dalam tatanan hukum.

Langkah-langkah kongkret yang harus diambil oleh pemerintah, lembaga hukum, dan Masyarakat dalam menjalankan prinsip kepatuhan terhadap hukum tanpa berkepihakan pada yang berkuasa

Beberapa langkah kongkret yang dapat diambil oleh pemerintah, lembaga hukum dan Masyarakat dalam menjalankan prinsip kepatuhan terhadap hukum tanpa berkepihakan pada yang berkuasa

1. Pemerintah

- Memberikan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggar hukum sekalipun itu termasuk mereka yang berkedudukan tinggi atau berkuasa.
- Memastikan penegakan hukum berjalan merata dan adil di perlukannya peningkatan koordinasi antar Lembaga penegak hukum.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum
- Kemampuan meningkatkan penegakan hukum menjadi aparat yang lebih professional, berintegritas tinggi, berkepribadian dan bermoral tinggi.

2. Lembaga hukum

- memberikan keputusan yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus hukum
- meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum untuk memastikan penegaakan hukum yang adil dan merata
- meningkatkan kualitas kemampuan hakim dan jaksa yang lebih professional, berkepribadian dan bermoral tinggi

- meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan

3. Masyarakat

- Membangun budaya hukum dengan menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku
- Melaporkan pelanggaran hukum yang mereka ketahui kepada lembaga penegak hukum
- Mendorong lembaga penegak hukum untuk bertindak secara adil dan merata
- Meningkatkan kesadaran hukum dengan mempelajari dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara

Perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam konteks penerapan hukum yang adil

Indonesia adalah negara yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyatnya. Hukum berfungsi untuk mengendalikan dan menertibkan masyarakat, memastikan bahwa setiap orang memenuhi kewajibannya dan mendapatkan hak-haknya. Ada dua jenis perlindungan hukum yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa hukum, sedangkan perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa ketika terjadi. Penegakan hukum memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap norma dan praktik hukum, karena hal ini memandu perilaku masyarakat dan hubungan hukum. Pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sangat ditekankan karena adanya hubungan yang erat antara hak asasi manusia dan martabat manusia. Indonesia sangat mementingkan penegakan hak asasi manusia, karena hal ini dianggap sebagai ciri khas negara sebagai negara hukum yang mengedepankan harkat dan martabat manusia.

Pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang. Salah satu undang-undang penting yang disahkan pada tahun 2000 adalah UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini membentuk pengadilan khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan ini memiliki prosedur dan metode yang berbeda dengan pengadilan pidana biasa, termasuk keterlibatan Komnas HAM dalam tahap investigasi dan komposisi hakim yang unik. Pengadilan ini terdiri dari lima orang hakim, dengan tiga orang hakim ad hoc, untuk memastikan perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental. Keberadaan pengadilan ini sangat penting untuk mencapai keadilan dan melindungi hak-hak sipil, ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Selain itu, terdapat peraturan pemerintah, Perpu No. 1/1999, yang bertujuan untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia tetapi tidak disetujui dan kemudian dicabut. Pada akhirnya, penegakan hak asasi manusia di Indonesia dituangkan dalam UU No. 39 tahun 1999.

Peran lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan

1. Peran kepolisian Negara Republik Indonesia

Polisi di Indonesia memiliki beberapa tugas dalam konteks investigasi dan penegakan hukum. Tugas-tugas tersebut antara lain membawa orang ke hadapan penyidik, memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya, melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dan penyitaan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mendatangkan ahli bila diperlukan untuk suatu kasus, menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, memberikan petunjuk penyidikan dan bantuan kepada penyidik pegawai negeri sipil, dan menerima hasil penyidikan mereka. Dalam situasi yang mendesak, polisi dapat meminta bantuan pejabat imigrasi untuk mencegah atau menangkap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana. Namun, dalam melaksanakan tugas-tugas ini, polisi harus mematuhi hukum kepolisian Republik Indonesia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hukum, dan keadilan. Mereka juga harus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan pengadilan, untuk memastikan keadilan yang efektif.

2. Peran Kejaksaan

- Melakukan penuntutan terhadap tersangka di dalam proses pengadilan
- Melakukan pengawasan kepada pelaksanaan putusan pidana bersyarat
- Melengkapi berkas perkara tertentu sesuai hukum
- Melakukan penyelidikan kepada tindak pidana
- Meaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- Melakukan penuntutan kepada tersangka didalam proses pengadilan
- Mewakili pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara

3. Peran pengadilan

Pengadilan memiliki tugas penting dalam menegakkan keadilan di Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi pengadilan dalam menegakkan keadilan

- Memberikan data dan informasi administrasi perkara, finansial, personal dan sarana prasarana baik kepada instansi internal maupun eksternal
- Menjamin perlindungan hukum bagi Masyarakat
- Menjamin keadilan bagi semua rakyat
- Menjamin hak asasi manusia

Selain itu, pengadilan juga berperan penting dalam menjaga kualitas dan integritas lembaga peradilan. Pengadilan harus menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya serta memastikan bahwa hakim, panitera dan pejabat struktural dan fungsional lainnya menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan etika dan standar yang berlaku. Pengadilan juga harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya tersedia dan memadai.

Hambatan atau tantangan dalam penegakan hukum yang perlu diatasi

Dalam menegakkan hukum, terdapat banyak hambatan dan tantangan tentunya. Hambatan dan tantangan ini perlu diatasi agar keadilan dapat terwujud.

Beberapa hambatan dan tantangan tersebut adalah: yang diambil meliputi:

1. Memperkuat peraturan perundang-undangan: Penting untuk meninjau dan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada untuk memastikan bahwa peraturan tersebut komprehensif dan efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Hal ini termasuk menyediakan pedoman dan kerangka hukum yang jelas untuk diikuti oleh para penegak hukum.
2. Meningkatkan profesionalisme dan etos kerja: Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, program dan instruksi yang berkelanjutan perlu diberikan kepada lembaga penegak hukum. Selain itu, mempromosikan perilaku etis dan memastikan akuntabilitas di antara aparat penegak hukum sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan dan pemahaman publik terhadap sistem hukum.
3. Meningkatkan fasilitas dan sumber daya: Penelitian dan sumber daya yang berkualitas tinggi harus dikonsultasikan dengan para ahli hukum untuk memastikan bahwa mereka memiliki alat, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan cara yang efisien. Hal ini termasuk meningkatkan kemampuan investigasi, meningkatkan kemampuan forensik, dan menyediakan kondisi kerja yang lebih baik bagi para penyelidik.
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam pekerjaan: Mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka di bawah hukum dapat membantu memastikan lebih banyak partisipasi dan pekerjaan masyarakat. Program berbasis masyarakat, seperti inisiatif ronda, antara masyarakat dan lembaga penegak hukum akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memperkuat hubungan.
5. Memerangi korupsi: Langkah-langkah yang kuat harus dilakukan untuk memerangi korupsi di dalam lembaga penegak hukum. Hal ini dalam

KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang adil dan merata, diperlukan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan juga pemberdayaan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang konsisten dan merata, tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Perlu juga adanya upaya untuk menghilangkan budaya korupsi para penegak hukum, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Adapun langkah yang dapat di ambil adalah langkah kongkret yang harus diambil oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam menjalankan prinsip kepatuhan terhadap hukum tanpa berkepihakan pada yang berkuasa. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi pelanggar hukum, meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, meningkatkan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih professional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi dan membangun budaya hukum dengan menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Dr. Oksidelfa Yanto., S. H. , M. H. (2020). NEGARA HUKUM (3). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum.
- Erwin. (2022). out. Rekontruksi Regulasi Bantuan Hukum Masyarakat.
- Fareha N. (2020). REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM WARGA PENGUNGSI BERDASARKAN HUKUM ANTRABNGSA (HAK ASASI MANUSIA).
- Febria Nurita, R., & Sugiarto, L. (n.d.). MEMBANGUN BUDAYA HUKUM INDONESIA DI ERA GLOBALISASI. In Jurnal Cahaya Keadilan (Vol. 6, Issue 1). Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan, F., Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa,
- P., Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2016). SEMINAR NASIONAL “Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global.”http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Irwan bayu. (2021). Buku Pancasila Menuju Satu Abad Kemerdekaan. Pancasila Menuju Satu Abad Kemerdekaan.
- Jessica Purba. (n.d.). Keadilan, J. P., Laia, A., Peduli, F., Hukum, P., & Indonesia, D. (n.d.). PENEGAKAN HUKUM DAN MORALITAS MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI. 2(1). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>
- M. Erwin Prawira Negara, SH. M. Kn. (2022). out (1). Rekontruksi Regulasi Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Yang Berbasis Nilai Keadilan. Pengantar, K., Artidjo, :, Yogyakarta,
- A., Studi, P., & Manusia, H. A. (2007). MENGURAI KOMPLEKSITAS HAK ASASI MANUSIA (Kajian Multi Perspektif).
- Sekti Pahlevi, F. (n.d.). REVITALISASI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA.
- Wicaksono, I., & Artikel, R. (2018). Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan HAM Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman. In Lex Scientia Law Review (Vol. 2, Issue 2). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/index>
- Yonas Bo, F. (2017a). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System.
- Yonas Bo, F. (2017b). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System.
- Yuniastuti. (n.d.). 40-Article Text-69-1-10-20181114. Penegakan Hhukum Yang Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Dan Anak.